CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BANTUL

2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Juga masyarakat, dalam rangka mewujudkan masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera .

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ini berisi tentang informasi seputar pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul selama Tahun Anggaran 2021. Baik mengenai pencapaian atau realisasi target kinerja per kegiatan. Juga memuat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja tersebut.Dilengkapi pula dengan informasi-informasi non keuangan yang kami pandang perlu untuk melengkapi Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

Harapan kami, Catatan Atas Laporan Keuangan ini bisa memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak.Selanjutnya kritik, saran dan masukan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul di tahun-tahun berikutnya.

Demikian, semoga bermanfaat.

Bantul, Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul

Stephanus Herus Wismantara,SIP.MM.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. : 196512261986021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI.... 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 3
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... 4
3. Sistematika Penulisan CALK 5

BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 6

1. Ekonomi Makro 6
2. Kebijakan Keuangan 9
3. Indikator Pencapaian Target Kinerja 10

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 12

1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja 12
2. Hambatan dan Kendala 12

BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI 14

1. Entitas Akutansi 14
2. Basis Akutansi..... 14
3. Basis Pengukuran 14
4. Penerapan Kebijakan..... 14

BAB V PENJELASASN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 15

1. Rincian Masing-masing Pos 15

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN..... 16

A. Umum..... 16

B. Khusus..... 16

BAB VII PENUTUP 17

BAB I
PENDAHULUAN

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pelapor dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

   Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas, akuntansi dan entitas pelaporan.

   Secara umum Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi peran pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

   Tujuan Spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas suber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

   a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
   b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
   c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten serta hasil-hasil yang telah dicapai.
   d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah kabupaten mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
   e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah kabupaten berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah kabupaten, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah kabupaten yaitu :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
l. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
m. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

Bab II Ekonomi Makro

Bab III Ikahtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kebangsaan Bantul berpengaruh terhadap ekonomi makro, baik di sekitar rill maupun sektor non rill.Out come-nya memang tidak langsung kelihatan seperti pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, jalan dan lain-lain. Akan tetapi situasi sosial politik yang kondusif akan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Tidak akan mungkin kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar jika tidak didukung dengan stabilitas sosial politik yang kondusif. Di sinilah peran penting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023

Sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**27.925.000**
1.	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**8.400.000**
2.	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**10.575.000**
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.940.000
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.701.864.406
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.597.204.406
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	1.246.357.555
3	Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	79.160.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	25.500.000
III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**334.338.000**
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.694.980

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.879.720
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.850.750
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**271.912.550**
IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	122.947.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.947.000
V.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	51.577.500
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.277.500
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	303.685.291
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.655.000
2.	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.440.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.590.291
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	943.402.730
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	943.402.730
1.	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	943.402.730
C	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	24.179.190.640
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	24.179.190.640
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	24.179.190.640

No.	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran
D.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	289.9980.000
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	289.9980.000
1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	289.9980.000
E.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	1.053.031.320
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.053.031.320
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.053.031.320
F	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	368.180.300
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	279.680.300
2.	**Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah**	88.500.000
	JUMLAH KESELURUHAN	30.376.122.187
G	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	150.000.000
I	ADAT,SENI,TRADISI,DAN LEMBAGA BUDAYA	
1.	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000
	JUMLAH KESELURUHAN	

2. Kebijakan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**27.925.000**	27.907.500
1.	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**8.400.000**	8.400.000
2.	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**10.575.000**	10.567.500
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.940.000	8.940.000
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.701.864.406	2.591.883.626
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.597.204.406	2.487.373.626
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	1.246.357.555	1.218.569.086
3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	79.160.000	**79.160.000**
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	25.500.000	**25.350.000**
III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**334.338.000**	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.694.980	**2.694.000**
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.879.720	**38.876.050**
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.850.750	**20.850.750**
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**271.912.550**	**268.737.304**

IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	122.947.000	**122.050.000**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.947.000	**122.050.000**
V.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	51.577.500	**50.887.322**
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	**300.000**
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	**723.122**
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.277.500	**49.864.000**
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	303.685.291	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.655.000	**198.091.200**
2.	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	**5.000.000**
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.440.000	**12.435.000**
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.590.291	**84.589.000**
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	943.402.730	**908.416.250**
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	943.402.730	**908.416.250**
1.	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	943.402.730	**908.416.250**
C	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	24.179.190.640	**24.139.282.595**
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	24.179.190.640	**24.139.282.595**
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	24.179.190.640	**24.139.282.595**
D.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	289.9980.000	**286.346.852**

I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	289.9980.000	**286.346.852**
1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	289.9980.000	**286.346.852**
E.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	1.053.031.320	**996.548.750**
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.053.031.320	**996.548.750**
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.053.031.320	**996.548.750**
F	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	368.180.300	**324.880.700**
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	368.180.300	**324.880.700**
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	279.680.300	**249.949.600**
2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	88.500.000	**75.150.000**
	JUMLAH KESELURUHAN	30.376.122.187	**30.227.726.899**
G	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	150.000.000	**148.250.000**
I	ADAT,SENI,TRADISI,DAN LEMBAGA BUDAYA		
1.	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000	**148.250.000**
	JUMLAH KESELURUHAN		

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul, Sebagai berikut :

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN (OUT PUT)	CAPAIAN HASIL (OUT COME)	KET
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)			
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			.		
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**27.925.000**	27.907.500			
1.	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**8.400.000**	8.400.000	Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan dan AKIP 2022	Renstra ,Renja , Dokumen AKIP	
2.	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**10.575.000**	10.567.500	Tersusunnya Dokumen RKA tahun 2023	RKA dan RKA Perubahan 2023	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.940.000	8.940.000	Tersusunnya Dokumen LKj 2022	LKj 2022	
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.701.864.406	2.591.883.626			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.597.204.406	2.487.373.626	Pembayaran Gaji	Pembayaran Gaji tepat waktu	
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	1.246.357.555	1.218.569.086	Pembayaran Tunjangan ASN	Pembayaran Tukin Tepat Waktu	
3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	79.160.000	**79.160.000**	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	CALK 2022	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan dan Semesteran	25.500.000	**25.350.000**	Tersusunnya Dokumen SPJ dan Evaluasi Renja	SPJ Bulanan dan Evaluasi Renja	

III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**334.338.000**				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.694.980	**2.694.000**	Tersedia Alat Listrik	Mengganti alat Listrik yang mati atau Rusak	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.879.720	**38.876.050**	Terlaksananya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedia Alat Tulis Kantor dan Bahan, alat Kebersihan	
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.850.750	**20.850.750**	Persediaan Barangf Cetakan dan Penggandaan	Tersedia barang cetak blangko2 dan Copy surat2 dan arsip lancar	
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-		.Tersedia Barang bacaan Koran	Bahan Bacaan Koran untuk informasi dalam daerah dan luar daerah tersedia	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**271.912.550**	**268.737.304**	Tersedianya makan dan minum rapat,perjalanan dalam dan luar daerah	SPPD Luar Daerah Karena Pandemi ada beberapa kegiatan yang diPending	
IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	122.947.000	**122.050.000**			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.947.000	**122.050.000**	Terlaksananya Pembelian belanja Modal	Laptop, Computer, Sound system dan Mebelair	

V.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	51.577.500	**50.887.322**			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	**300.000**	Tersedianya Meterai	Meterai	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	**723.122**	Pembayaran Telepon dan listrik	Terpenuhi Pembayaran Telepon dan Listrik	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.277.500	**49.864.000**	Honor bagi tenaga teknis penjaga malam dan petugas kebersihan	Terbayarnya Honor bagi tenaga teknis penjaga malam dan petugas kebersihan	
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	303.685.291		Servis, suku cadang dan BBM kendaraan	Terwujudnya kenyamanan mobilitas dalam bekerja	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.655.000	**198.091.200**	Jasa Pajaak Kendaraan Bermotor Dinas	Pajak STNK Motor & Mobil terpenuhi	
2.	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	**5.000.000**	Terlaksana Pembelian Laptop,LCD dan AC	Pekerjaan Berjalan Lancar	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.440.000	**12.435.000**	Pemeliharaan gedung	Kenyamanan dalam bekerja	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.590.291	**84.589.000**			
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	943.402.730	**908.416.250**	**Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila bagi Warga Masyarakat**	**Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kewbangsaan Bagi Warga Masyarakat**	

I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	943.402.730	**908.416.250**			
1.	**Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	943.402.730	**908.416.250**			
C	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	24.179.190.640	**24.139.282.595**	Sosialisasi dan TOT Pemilos batal dilaksanakan karena Pandemi Bimtek Pendampingan pengurus parpol Verifikasi proposal bantuan parpol Terlaksananya dialog politik, Desk Pilkada 2020	Peningkatan pemahamnan demokrasi di masyarakat.	
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	24.179.190.640	**24.139.282.595**			
1.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	24.179.190.640	**24.139.282.595**			

D.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	289.9980.000	**286.346.852**	Workshop Ormas, Verifikasi Ormas ,dan FGD Ormasy	Tersedianya data dan informasi ormas,orsos dan LSM	
I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	289.9980.000	**286.346.852**			
1.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	289.9980.000	**286.346.852**			
E.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	1.053.031.320	**996.548.750**	**Dialok dan Raker FKUB, FGD dan Raker FPK, Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Raker P4GN,Sosialisasi Bahaya Narkoba,**	**Dokumen Laporan hasil Raker dan Peningkatan Kesadaran bahaya Narkoba bagi Masyarakat dan generasi Muda**	
I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.053.031.320	**996.548.750**			
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.053.031.320	**996.548.750**			
F	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**324.880.700**	Workshop Kominda, Workshop pembinaan satuan keamanan lingkungan, Rakor Kominda, dan Rakor Penangganan Konflik Sosial.	Terwujudnya keamanan lingkungan	

I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	368.180.300	**324.880.700**	Rakor Tim, Sosialisasi jaga warga, Workshop FKDM, Diskusi Kelompok masyarakat, diskusi pemberdayaan masyarakat untuk perangkat desa	Terwujudnya Kewaspadaan Dini Masyarakat dan keamanan lingkungan	
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	279.680.300	**249.949.600**	**FGD dan Rakor Penanganan Konflik, FGD dan Rakor Kominda,Rakor FKDM**	**Dokumen Laporan Hasil Rapat koordinasi,Terciptanya Stabilitas di Masyarakat**	
2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	88.500.000	**75.150.000**			
	JUMLAH KESELURUHAN	30.376.122.187	**30.227.726.899**			
G	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	150.000.000	**148.250.000**	**Terlaksananya kegian FPK Pembauran Kebangsaan dengan Tema Budaya Daerah**	**Bimtek FPK**	
I	ADAT,SENI,TRADISI,DAN LEMBAGA BUDAYA					
1.	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000	**148.250.000**			

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul

Belanja Operasi sebesar

Jumlah total SP2D uang persediaan (UP) sebesar	Rp. 300.000.000
Jumlah total SP2D ganti uang (GU) sebesar	Rp 3.985.171.361
Jumlah SP2D tambah uang (TU) sebesar	Rp 732.161.635
Jumlah SP2D LS	Rp 25.388.001.426
Jumlah LS (gaji Tukin)	Rp 2.487.373.626
Jumlah Total Penerimaan	**Rp. 30.405.334.442**
dari total anggaran	Rp 30.526.122.187
Anggaran yang telah dibelanjakan sebesar	**Rp 30.227.726.899**

Sedangkan saldo kas yang disetor ke Kasda sebesar Rp 177.607.523 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)

2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada tahun 2023 adalah Perlu lebih banyak koordinasi antar stekholder dan pemangku kepentingan.

Dari sisi sarana dan prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul masih perlu ditambah dan ditingkatkan SDM-nya. Sebagai gambaran dari 19 pegawai,4 berpendidikan pasca sarjana, 7 Pegawai yang berpendidikan sarjana, SMA ada 6 pegawai , sedangkan ada 2 pegawai tidak tetep di Kabupaten Bantul. Disamping diperlukan penempatan SDM yang sesuai kemampuan, juga diperlukan pelatihan-pelatihan misalnya untuk pembuatan laporan keuangan administrasi, komputer dll.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akutansi

   Adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

   Basis akuntansi yang dipakai dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pangakuan pendapatan, belanja pembiayaan dalam realisasi anggaran dan basis aktual dalam pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam laporan.

3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

   Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintah dalam Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rincian masing-masing pos-pos laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

2. Pendapatan

   Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali.

3. Belanja

   Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kabupaten.

4. Aset

   Aset asalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu yang mempunyai manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat dan yang dapat diukur dengan satuan uang.

5. Kewajiban

   Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

6. Ekuitas Dana

   Ekuitas dana adalah kekayaan pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Umum

Secara umum program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2019 sudah dapat berjalan tertib dan lancar. Namun ada satu kegiatan yang menyisakan anggaran cukup banyak yaitu:

I.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Maksud dan tujuan program ini adalah tercapainya cakupan pembinaan wawasan kebangsaan sebesar 100% dengan realisasi 100%. Pagu anggaran sebesar Rp 943.402.730,- dengan realisasi sebesar Rp908.416.250 atau 96.29%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain:

1). Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah tercapainya cakupan pembinaan wawasan kebangsaan target 100% realiasasi 100%.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp943.402.730 terealisasi sebesar Rp 908.416.250 atau 96.29 %.

Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
  Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan . Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:
  - Pelaksanaan lomba upacara SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (masing-masing kecamatan satu jenjang sekolah)
  - Pemantapan peserta wawasan kebangsaan untuk siswa sekolah dan umum (19 kali)

II. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Maksud dan tujuan program ini adalah Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi anggaran program Rp 24.179.190.640.dengan realisasi Rp 24.139.282.595 atau 99.8 %, adapun kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Pagu anggaran sebesar Rp 24.179.190.640 dengan realisasi Rp 24.139.282.595 atau 99.8%,

   Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan sebagai berikut:

   - Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah. Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananyaKebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah adapun bentuk dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

     - Dialog Politik
     - TOT dan Sosialisasi Pemilos.
     - Bimtek dan Verifikasi Bantuan Parpol.

III. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalahUntuk meningkaatkan Percentaase Pemilih yang berpartisipasi. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 289.980.000 terealisasi sebesar Rp 286.346.852 atau 98.74%

adapun kegiatan nya sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 289.980.000 terealisasi sebesar Rp 286.346.852 atau

98.74%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Tercapainya Cakupaan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan ini terdiri dari Sub Kegiatan:

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu sebesar Rp 298.980.000 terealisasi sebesar Rp 286.346.852 atau 98.74%. Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalahTerlaksananya kebijakan dibidang Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas asingdi daerah, adapun daaalam bentuk :

- FGD Ormas,Orsos dan LSM
- Mediasi Persengketaan Ormas,Orsos dan LSM
- Pendaftaran ,Pendataan,Verifikasi Ormas,Orsos dan LSM
- Rapat Koordinasi Ormas, Orsos dan LSM.

III. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalahTercapainya Percentase FKUB yang aktif di tingkat Kecamatan Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.053.031.320 dengan realisasi sebesar Rp 996.548.750 atau 94.63 %.

Adapun kegiatan sebagai berikut:

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.053.031.320 dengan realisasi sebesar Rp 996.548.750 atau 94.63%. Maksud dan Tujuan kegiatan ini adalah Terwujudnya Kerukunan antar umat beragama.

dengan sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 1.053.031.320 dengan realisasi sebesar Rp 996.548.750.atau 94.63 %.dengan maksut dan tujuan sub kegiatan ini Tercapainya Kebijakan di bidang Ketahanan ekonomi,Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah . Adapun bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Dialog & Rapat Kerja FKUB(Forum Kerukunan Umat Beragama)
- FGD & Rapat Kerja FPK (pembauran Kebangsaan)
- Konseling Pelajar di daalam kelas
- Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB Rumah Ibadah
- Penyuluhan Narkotika & Rapat Kerja P4GN

IV. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kuaaalitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Maksud dan tujuan kegiatan ini Persentase FKDM Tingkat Kecamatan Pagu anggaran ini sebesar Rp 368.180.300 terealisasi sebesar Rp 324.880.700 atau 88.23 %.

Adapun kegiatan sebagai berikut : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Maksud dan tujuan kegiatan ini Persentase FKDM aktif Tingkat Kecamatan Pagu anggaran ini sebesar Rp 368.180.300 terealisasi sebesar Rp 324.880.700 atau 88.23 %.

Dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 279.680.300 terealisasi sebesar Rp 249.730.700 atau 89.29 %. Maksut dan tujuan sub kegiatan ini :terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah adapun bentuk nya sebagai berikut :

   - FGD & Raapat penanganan konflik social
   - FGD & rapat POA
   - FGD & rapat Tertutup
   - FGD & Pemberdayaan Kelompok Masyarakat
   - Pelaatihan FKDM
   - Pemantauan & pembinaan Satuan keamanan di masyarakat
   - Pemberdayaan perangkat desa
   - Pembayaran honor Tim PKS dan FKDM.

2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota (Forkompimda) Pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 88.500.000 terealisasi sebesar Rp 75.150.000 atau 84.91 %Maksud dan Tujuan Kegian ini : sebagai fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Forkompimda , Forkompimda dibentuk untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah .
   Unsurnya terdiri dari : Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian,Kepala Kejaksaan dan Komandan TNI di Kabupaten.Kegiatan terdiri dari :
   - Rapat Koordinasi Pimpinan
   - Pemberian Honor

V. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Maksud dan Tujuan Kegiatan ini untuk membentuk** : Kader Pembauran Budaya Istimewa yang ada di Kabupaten Bantul. Pagu anggaran dari Dana Danais sebesar Rp 150.000.000 terealisasi Rp 148.250.000 atau sebanyak 98.83 % adapun kegiatanya sebagai berikut:

   - Sosialisasi Budaya daerah Istimewa Yogyakarta bagi Mahasiswa luar daerah yang tinggal di Bantul.
   - Pengenalan Budaya Daerah Istimewa yang ada masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul ini sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi maksud dan tujuannya, dan dapat dibaca oleh semua pihak.

Untuk itu saran dan kritik kami harapkan agar ke depan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dapat lebih meningkat lagi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul lebih mampu menjadi instansi yang strategis dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul, menuju visi Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Bantul, Januari 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul

St. HERU WISMANTARA,SIP.MM
Pembina Utama Muda ,IV/c
NIP. : 196512261986021001